

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2022, Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial mengimplementasikan perubahan baru dengan mentransformasi program pemberdayaan sosial Kelompok Usaha Bersama Ekonomi atau yang disingkat (KUBE) menjadi Program Kewirausahaan Sosial atau yang disingkat (ProKUS), yang selanjutnya mengalami perkembangan menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara atau yang disingkat (PENA). Oleh karena itu, penelitian terdahulu dalam konteks ini membahas evaluasi kebijakan program Kelompok Usaha Bersama.

Evaluasi program usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama (UEP KUBE) telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. Putro et al., (2020) dalam penelitian yang dia lakukan, penilaian kebijakan membantu dalam penyampaian rekomendasi untuk perbaikan kebijakan publik. Ada kemungkinan untuk memprioritaskan langkah berikutnya dengan mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi alternatifnya. Berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William Dunn yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) di Kota Batu tidak efektif. Pertama, efektivitas program KUBE di Kecamatan Batu masih kurang memadai karena sejumlah anggota tidak terlibat sepenuhnya dalam kegiatan produksi. Kedua, efisiensi pengelolaan dana kelompok KUBE kurang optimal, dengan kebingungan terkait penggunaan dana untuk pembelian barang produksi. Ketiga, standar kecukupan terkait evaluasi dan estimasi metode alternatif untuk menyelesaikan masalah masih perlu ditingkatkan. Keempat, meskipun anggota telah memahami standar pemerataan manfaat program KUBE, implementasinya masih perlu diperbaiki. Kelima, responsivitas program KUBE belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang relevan terkait bagaimana tindakan menanggapi implementasi kebijakan. Keenam, ketepatan pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Batu masih belum memenuhi standar yang diharapkan.

Sejalan dengan Putro et al., (2020) Pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui beberapa aspek kunci, yaitu pemungkinan, penguatan, proteksi, dan pendukung. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan masyarakat atau komunitas dengan menggunakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Penting untuk melakukan pengenalan dan pembinaan secara menyeluruh terkait pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE, melibatkan koordinator KUBE dan anggota kelompok. Motivasi partisipasi dalam aktivitas KUBE menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan program ini. Dalam aspek perlindungan, memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan kepada setiap anggota KUBE menjadi langkah yang proaktif dalam melindungi mereka dari risiko-risiko tertentu. Evaluasi penelitian di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi akan menentukan sejauh mana implementasi program KUBE mampu mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. (Ramadani & Ms, 2022).

Indrika (2013), menurut penelitiannya, Keberhasilan program KUBE di Tanjung dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator. Pertama, anggota program memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membentuk ceriping ketela. Selain itu, terdapat peningkatan kualitas hayati dan kesejahteraan keluarga, yang tercermin dari anggota yang mendapatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, mendapatkan pendidikan keluarga yang lebih baik, dan terjalinnya korelasi sosial yang positif. Kunci keberhasilan Program KUBE Tanjung melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengelola program, anggota KUBE, penyedia bahan mentah, pasar, pemerintah, dan pihak lain yang memberikan bantuan. Kerjasama yang baik ini didorong oleh motivasi internal dan eksternal, kepercayaan antar pihak terkait, dan respons positif dari pasar terhadap produk yang dihasilkan. Meskipun berhasil, program ini juga menghadapi beberapa hambatan. Pertama, terbatasnya dana menjadi kendala dalam berpartisipasi dalam persaingan. Kedua, keterbatasan bahan standar dapat mempengaruhi kualitas produksi. Ketiga, terkadang kurangnya koneksi antar anggota dapat menyebabkan rasa bosan dan kurangnya semangat dalam program. Terakhir, keberhasilan program juga dihadapkan pada tantangan

pesaing yang cukup banyak di pasar. Dengan pemahaman ini, dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan program KUBE di Tanjung, seperti peningkatan akses ke dana, penyediaan bahan baku yang memadai, memperkuat konektivitas antar anggota, dan strategi untuk bersaing di pasar yang penuh tantangan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Sri & Andayani (1996), menurut penelitian yang dilakukan, model pembangunan terpusat yang telah diterapkan selama bertahun-tahun hanya memberikan penekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun gagal mencapai keseimbangan dengan aspek konteks sosial, politik, dan sistem ekonomi yang bersifat demokoratis dan adil. Pendekatan ini menjadi dasar dari krisis moneter dan ekonomi, dipicu oleh pembangunan ekonomi yang rentan dan sistem pemerintahan yang birokratis, korup, dan tidak demokratis. Krisis ini juga hampir menyebabkan krisis moral yang mengkhawatirkan, merembet ke dalam krisis nasional yang berkelanjutan, mengancam kesatuan dan eksistensi bangsa. Sebagai respons terhadap kondisi ini, dilakukan reformasi di berbagai sektor dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri, memperkuat kapabilitas, dan memulai proses pemulihan, konsolidasi, serta pengembangan pembangunan. Pergeseran ini mengadopsi kerangka berpikir baru, yang mengutamakan keberlanjutan dan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Indonesia berkomitmen untuk merintis perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah dengan mengadopsi pemahaman atau pengertian yang luas terhadap kedaulatan, sesuai dengan aspirasi dalam proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Reformasi ini dimaksudkan untuk menciptakan fondasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Artikel selanjutnya ditulis oleh History & Dhuafa (2021), dalam pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi di wilayah Lopang Gede Kota Serang, program kelompok usaha bersama (KUBE) yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Serang telah menghasilkan hasil yang baik, yaitu masyarakat menjadi lebih berdikari secara ekonomi dan kemiskinan berkurang. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh program penilaian adalah tentang kenda pembukuan dan pemilihan penerima donasi. Dalam proses pembukuan yang tidak

rapi oleh penerima bantuan, peneliti menyarankan supervisi intens agar kesalahan dapat diperbaiki segera. Peneliti menyarankan agar Dinas Sosial Kota Serang lebih memilih untuk menggunakan penerima donasi dengan hati-hati dan bijak, dan produk yang diberikan harus sesuai dengan harapan penerima donasi tetapi tetap selaras dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada saat ini.

Selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Akhmad (2020), Teori sosial demokrat menyatakan bahwa kondisi kurang mampu dari segi ekonomi bukanlah masalah yang bersifat individual atau pribadi, akan tetapi struktural. Kemiskinan dipandang sebagai hasil dari ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat, yang diakibatkan oleh pembatasan pendekatan tertentu kelompok individu terhadap berbagai sumber daya dan peluang masyarakat. Meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan sistem pasar bebas, kaum sosial demokrat tidak melihat Sistem ekonomi berbasis kapitalisme sebagai sesuatu yang secara intrinsik jahat. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa sistem kapitalis tetap menjadi bentuk Penyelenggaraan ekonomi yang paling efisien. Pendekatan sosial demokrat menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan harus dilakukan melalui tindakan yang bersifat struktural, seperti perubahan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Mereka menekankan perlunya memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan sumber daya lainnya. Dengan demikian, pandangan sosial demokrat menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan dan mempromosikan kesejahteraan sosial, tanpa menolak sepenuhnya konsep kapitalisme sebagai sistem ekonomi.

Menurut Ningrum (2017), Peran Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) mencakup berbagai dimensi yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anggotanya. Melalui peran-peran ini, KUBE dapat menjadi wadah yang efektif untuk memberdayakan anggotanya dalam berbagai aspek, mulai dari pengetahuan dan keterampilan hingga dukungan sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan artikel yang ditulis Ningrum, Paulu (2022) mengatakan bahwa Peningkatan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap langkah-langkah untuk meningkatkan pemasukan penduduk di wilayah Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan. Kenaikan kualitas program KUBE menjadi kunci dalam mendorong peningkatan pendapatan ini, karena usaha yang dilakukan oleh kelompok merupakan komponen utama dari pendapatan anggota. Secara spesifik, dapat disimpulkan bahwa Program Kelompok Usaha Bersama mempunyai dampak yang besar, mencapai 76,8%, berpengaruh terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Sementara itu, sebanyak 23,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti program PNPB Mandiri, program bantuan kelompok pertanian, dan program bantuan modal usaha. Artinya, program KUBE secara langsung Memberikan kontribusi yang berarti pada peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa ada faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, dan pengelolaan program-program tersebut dapat saling melengkapi untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas program KUBE serta mengkoordinasikan program-program lainnya, dapat diharapkan peningkatan yang lebih besar dalam kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdasarkan studi sebelumnya yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat digambarkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai analisis kebijakan program pengentasan kemiskinan yang digagas oleh Kementerian Sosial, yaitu Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial. Batasan dari penelitian ini adalah pembahasan proses dan dampak program PENA tepatnya evaluasi kebijakan program tahun 2022.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Evaluasi

Dalam bahasa Inggris, "penilaian" berasal dari kata "penaksiran" atau "evaluasi", dan secara harfiah, "penilaian" berarti proses menentukan nilai suatu hal atau objek menggunakan referensi eksklusif untuk mencapai tujuan eksklusif. Evaluasi berarti aktivitas mengumpulkan informasi untuk menilai alat, teknik, atau hasil kerja manusia. Hasilnya digunakan sebagai parameter untuk membuat keputusan tentang aktivitas apa yang harus dilakukan. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari proses evaluasi, Anda dapat meningkatkan kinerja kegiatan yang sedang

berlangsung, mengidentifikasi gangguan interupsi yang terjadi sejak awal evaluasi, dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah dan tetap produktif (Kurnia, 2022). Evaluasi dapat dikatakan hal yang penting karena dapat mengumpulkan data untuk meningkatkan kinerja program yang sedang berlangsung.

Suchman (1961, dalam Anderson 1975) mengartikan evaluasi ialah penilai bagi suatu proses menilai hasil dari berbagai upaya yang dilakukan digunakan untuk memberikan dukungan pencapaian tujuan. Worthen dan Sanders (1973, dalam Anderson 1971) memberikan definisi tambahan, menggambarkan evaluasi sebagai proses pencarian informasi berguna tentang sesuatu. Dalam konteks ini, mencari informasi melibatkan penilaian terhadap eksistensi sebuah program, kegiatan manufaktur, proses, dan opsi lain pendekatan yang ditawarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stufflebeam, seorang ahli terkemuka dalam evaluasi program (1971, dalam Fernandes 1984), evaluasi didefinisikan sebagai proses pencarian, penggambaran, dan penyediaan informasi yang sangat membantu pengambil keputusan dalam menentukan pilihan alternatif. Dalam pandangan ini, evaluasi tidak hanya terbatas pada penilaian hasil, tetapi juga melibatkan pengumpulan dan presentasi data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan terkait dengan berbagai alternatif yang mungkin (Arikunto & Jabar, 2018).

Menurut Wirawan (2011), evaluasi merupakan suatu riset yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang berguna mengenai objek evaluasi. Setelah itu, informasi tersebut dinilai dan dibandingkan dengan indikator evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan objek evaluasi tersebut. Definisi tersebut sejalan dengan pandangan umum mengenai evaluasi sebagai suatu proses sistematis untuk menilai, mengukur, dan memahami efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program, kebijakan, atau proyek. Evaluasi bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Buku Hadi tentang Metode Riset Evaluasi juga

menggambarkan evaluasi sebagai suatu proses yang melibatkan pengumpulan data terkait suatu objek., penilaian terhadap objek tersebut, dan perbandingan dengan standar, dan indikator. Ini mencerminkan pendekatan yang holistik terhadap evaluasi, di mana berbagai aspek diukur dan dinilai untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek evaluasi (Lamsuri et al., 2011).

Definisi evaluasi yang diberikan oleh Wirawan dan Hadi menyiratkan bahwa evaluasi dapat disederhanakan sebagai suatu tahap proses evaluasi yang fokus pada objek penilaian. Tujuannya adalah untuk memahami keadaan objek tersebut dengan menerapkan alat atau perangkat khusus, dan hasil evaluasi didokumentasikan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk pemahaman lebih lanjut, pembuatan keputusan, atau perbaikan objek evaluasi tersebut. Dalam konteks ini, evaluasi merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan dokumentasi untuk memberikan pandangan yang jelas dan obyektif mengenai performa atau karakteristik objek evaluasi. Menurut William N. Dunn, ada tiga evaluasi kebijakan yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah bahwa evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang sah dan dapat diandalkan tentang sebuah evaluasi kebijakan yang mengevaluasi kinerja kebijakan dalam bidang berikut:

- a) Evaluasi kebijakan dapat menilai sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah terpenuhi melalui implementasi kebijakan atau program. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan memiliki kapasitas untuk mengungkapkan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan khusus dari kebijakan atau program tersebut. Proses evaluasi akan melibatkan penilaian terhadap dampak dan efektivitas tindakan kebijakan, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini kemudian dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan atau program tersebut telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat, mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan memberikan kesempatan yang diharapkan.

- b) Evaluasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan efektivitas, responsivitas, akuntabilitas, dan keadilan dari tindakan yang diambil oleh lembaga pelaksana. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan harus menilai kinerja lembaga pelaksana dalam melaksanakan tindakan kebijakan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, evaluasi kebijakan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja lembaga pelaksana dan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan-tujuannya sambil tetap memperhatikan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.
- c) Evaluasi kebijakan harus memeriksa sejauh mana Efek dan dampak dari kebijakan tersebut juga perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, evaluator kebijakan harus dapat membedakan antara output (hasil langsung) dan outcome (dampak atau hasil akhir) yang dihasilkan dari implementasi kebijakan.. Output adalah hasil langsung dari kegiatan atau tindakan kebijakan, sementara outcome adalah dampak jangka panjang atau perubahan yang dihasilkan dari output tersebut. Dalam penelitian ini, evaluator kebijakan akan meneliti program Pahlawan Ekonomi Nusantara di Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022. Beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan meliputi: Output: Langkah-langkah konkret atau produk yang dihasilkan oleh program, seperti jumlah pelatihan yang diselenggarakan, jumlah usaha mikro yang didukung, atau jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta. Outcome: Dampak jangka panjang dari kebijakan, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, atau peningkatan kemandirian ekonomi di wilayah tersebut. Efek Positif dan Negatif: Evaluasi perlu memperhatikan efek positif yang dihasilkan, serta potensi dampak negatif atau unintended consequences yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. Keterkaitan dengan Tujuan

Kebijakan: Evaluasi harus mengidentifikasi sejauh mana outcome mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan pada awal implementasi. Dengan membedakan output dan outcome, evaluator kebijakan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang efek dan dampak dari program Pahlawan Ekonomi Nusantara di Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2022 (Arikunto, 2021).

Menurut Beni Setiawan (1999:20) dari Direktorat Pemantauan dan Penilaian Bapenas menggariskan bahwa tujuan evaluasi program adalah untuk secara tepat menilai pencapaian hasil, perkembangan, dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan dengan maksud memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana program mencapai tujuannya, menilai perkembangan yang telah dicapai, dan mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin muncul. Hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi landasan untuk penilaian, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan implementasi program di masa yang akan datang. Dengan demikian, evaluasi program tidak hanya menjadi alat untuk mengukur kesuksesan program saat ini, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. (Yusten, 2023). Menurut Yusten (2023) evaluasi merupakan metode untuk menunjukkan apakah suatu program berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya. Akibatnya, konsep penilaian sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengelolaan program, yang meliputi:

- a) Evaluasi pada tahap (EX-ANTE) perancangan bertujuan untuk membantu dalam pemilihan dan penentuan utama dari berbagai opsi serta potensi cara untuk Meraih sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini, evaluasi menjadi alat yang sangat berharga untuk menginformasikan keputusan perencanaan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap pilihan.

- b) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ON-GOING) bertujuan untuk mengukur kemajuan program selama pelaksanaannya, dibandingkan dengan skenario yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini, evaluasi menjadi alat yang penting untuk memantau dan menilai apakah program berjalan sesuai dengan harapan dan apakah langkah-langkah korektif atau perbaikan diperlukan
- c) Tujuan evaluasi tahap pasca pelaksanaan (EX-POST) adalah untuk mengevaluasi apakah prestasi program, termasuk keluaran, hasil, atau dampaknya, dapat menangani permasalahan pembangunan yang ingin diatasi. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir dengan fokus pada aspek-aspek seperti relevansi, efektivitas, kemanfaatan, dan keberlanjutan

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi program dapat menjadi penilaian suatu program dapat dikatakan berhasil ataupun gagal, kemajuan ataupun hambatan yang dijumpai untuk memperbaiki program tersebut, hal ini program yang akan diteliti mengenai program PENA pada tahun 2022.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip atau standar yang mengarah pada suatu tujuan dan target, sangat dipengaruhi oleh evaluasi. Menurut Nawawi (2006), Evaluasi kinerja juga dapat diartikan sebagai langkah pengukuran atau penilaian pelaksanaan untuk menentukan seberapa efektif atau tidak efektif seorang pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan area pekerjaannya. Evaluasi kinerja juga dapat diartikan sebagai langkah pengukuran atau penilaian pelaksanaan untuk menentukan seberapa efektif atau tidak efektif seorang pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan area pekerjaannya. "Pelaksanaan atau actuating didefinisikan sebagai tindakan untuk mendorong semua anggota agar berusaha mencapai tujuan sesuai dengan rencana manajerial dan upaya-upaya organisasi".

Menurut Nawawi (2006), pengawasan atau pengendalian adalah kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan mencapai

hasil yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan, setiap rencana memiliki potensi untuk gagal. Evaluasi dilakukan setelahnya untuk menilai sejauh mana keberhasilan program tersebut telah dicapai.

Dalam proses kerja dalam suatu organisasi, evaluasi sangat penting karena akan mempermudah proses kerja. "Penilaian (evaluasi) dapat didefinisikan atau didefinisikan Sebagai sebuah proses atau serangkaian kegiatan untuk mengukur dan membandingkan hasil pekerjaan atau produktivitas kerja dengan target yang telah direncanakan.

Menurut Dunn (2000), Pembatasan dalam evaluasi kebijakan publik dapat dirinci dengan menyatakan, "Istilah evaluasi memiliki makna yang saling terkait, di mana setiapnya merujuk pada penerapan berbagai penilaian terhadap hasil kebijakan dan program. Batasan lain terkait evaluasi kebijakan publik juga diberikan oleh Suchman (dalam Solichin (1997)), Suchman menggambarkan evaluasi sebagai "proses memberikan nilai pada beberapa tujuan dan kemudian menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut." Dalam konteks ini, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses melekatkan nilai pada beberapa tujuan dan selanjutnya menentukan sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan dua pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan jika evaluasi merupakan proses untuk memahami dan menilai sejauh mana suatu program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses kebijakan publik mencakup evaluasi kebijakan publik, yang melibatkan kegiatan pengumpulan, analisis, dan penilaian hasil serta dampak atau hasil dari kebijakan publik. Tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah memberikan data terkait kesuksesan program dan dampak yang dihasilkannya. Evaluasi kebijakan publik diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan dalam menentukan apakah suatu program atau kebijakan perlu diteruskan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan.

2.2.2 Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Lembaga ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengawasi kebijakan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial, bersama dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional 2021-2024, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial mengeluarkan program penyaluran bantuan sosial sesuai dengan Peraturan menteri sosial No 7 Tahun 2023 tentang program pemberdayaan fakir miskin melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Pemerintah melakukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk menangani fakir miskin. Pemerintah di sini memiliki hak untuk membuat keputusan dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan keadaan masyarakat. Berdasarkan kebijakan ini, program dilakukan untuk mendorong kelembagaan masyarakat, membantu fakir miskin belajar berusaha, mendapatkan jaminan, dan mendapatkan perlindungan sosial, sehingga mereka merasa aman. Bentuk bantuan yang diberikan program PENA ini seperti bantuan usaha, pelatihan, dan pendampingan. Menurut Permensos Nomor 7 Tahun 2023 Dipasal 2 mengenai ketentuan umum, Program PENA ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial melalui usaha yang berkelanjutan, dengan cara meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara berdikari. Program ini juga melibatkan koordinasi antara kementerian dan pemerintah, dan kolaborasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan masyarakat. Sinergi harus diciptakan antara keduanya dan memerlukan partisipasi warga. Penanggulangan kemiskinan merujuk pada rangkaian kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan kepada individu, kelompok, atau warga yang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak.

Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) adalah program bantuan sosial dan jaminan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan kewirausahaan melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi untuk meningkatkan produksi. Program ini membantu pengembangan usaha. Sasaran program ini adalah kelompok

masyarakat miskin, rentan, dan mengalami risiko sosial. Penerima manfaat program ini termasuk KPM PKH, KPM Sembako, KPM RST/RTLH, PD Potensial, dan individu yang mengalami risiko sosial. Jenis bantuan sosial yang diberikan adalah bantuan tunai, yang akan dipergunakan untuk menguatkan produksi KPM tersebut. Serta proses pembelanjaan barang yang diawasi oleh setiap pendamping sosialnya. Program PENA ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan social melalui usaha yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 mengenai perkembangan kewirausahaan nasional 2021-2024, Menteri Sosial berpartisipasi secara aktif dalam komisi tersebut. Dalam hal ini, kewirausahaan sosial termasuk dalam kategori kewirausahaan tematik bisnis nasional, dan tanggung jawab Menteri Sosial adalah mengawasinya. Tugas utamanya adalah mendorong gagasan bisnis untuk membangun startup yang mendukung pertumbuhan ekosistem usaha di seluruh negara. Ada dua cara untuk mendorong bidang bisnis ini untuk berkembang. Cara pertama adalah melalui inkubasi, yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknis, workshop, pendampingan, pendanaan, sertifikasi, dan izin. Cara kedua adalah dengan memberikan bantuan, seperti subsidi, insentif, mesin, dan sarana usaha.

Diharapkan program ini akan menjadi program prioritas di Kementerian Sosial untuk graduasi kelompok masyarakat miskin dan rentan, melepaskan ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial, dan mengarahkan mereka menjadi produktif dan mandiri. Karena Kementerian Sosial memiliki otoritas untuk melakukan intervensi pemberdayaan pada tingkat ini, PENA juga berfokus untuk memberdayakan kelompok rentan, terutama dalam menangani kemiskinan ekstrim. Agar kelompok rentan atau sangat miskin tidak dikecualikan, sangat penting untuk memberi mereka motivasi, dorongan, dan semangat untuk berubah.